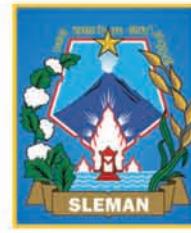




Dra. Hj. KUSTINI SRI PURNOMO
BUPATI SLEMAN



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶିତ ଲୋକଙ୍କାରୀ

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023



DANANG MAHARSA, SE.
WAKIL BUPATI SLEMAN



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuangan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saja material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

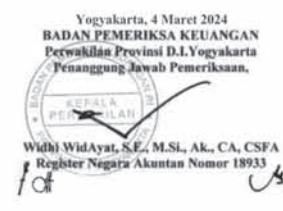
Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material. Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengukuran dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih mendasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemkab Sleman untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemkab Sleman. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemkab Sleman, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemkab Sleman tanggal 31 Desember 2023, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 3B/LHP/XVII/OG/03/2024 tanggal 4 Maret 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.



LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

No	Uraian	Ref	2023	2022	Kemungkinan	%
1	KEGAIKANAN OPERASIONAL					
2	PENDAPATAN	5.4.1				
3	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.4.1.1				
4	Pendapatan pajak daerah	5.4.1.1.1	841,470,638,732,17	765,733,709,861,36	76,296,868,870,81	109,97
5	Pendapatan Retribusi Daerah	5.4.1.2	42,039,114,510,24	40,483,556,641,50	1,355,544,842,00	103,33
6	Pendapatan Penyaluran Kekayaan Negara yang Dimiliki	5.4.1.3	39,886,968,493,68	39,591,804,271,15	38,649,260,630,00	100,75
7	Lain - lain PAD yang sah	5.4.1.4	224,459,330,524,08	206,174,777,019,15	18,285,153,504,90	100,87
8	Jumlah Pendapatan Asli Daerah		1,427,796,051,880,17	1,051,983,371,292,99	95,272,453,020,00	109,2
9	PENDAPATAN TRANSFER	5.4.1.2				
10	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PEMERIKSAAN	5.4.1.2.1				
11	Dana Bagi Hasil	5.4.1.2.1.1	78,570,516,548,00	58,506,541,382,00	19,634,731,966,00	113,27
12	Dana Pendapatan Negara	5.4.1.2.1.2	91,708,817,535,00	92,381,546,250,00	50,326,869,250,00	105,46
13	Dana Alokasi Khusus - Fisik	5.4.1.2.1.3	23,251,738,208,00	109,813,547,630,00	85,929,899,481,00	213
14	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	5.4.1.2.1.4	341,904,679,492,00	272,010,519,700,00	12,787,210,00	102,72
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		1,416,473,691,781,00	1,041,160,774,271,00	4,347,496,520,00	100,3
16	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	5.4.1.2.2				
17	Dana Bagi Hasil	5.4.1.2.2.1	48,593,705,000,00	33,641,571,000,00	14,952,328,000,00	144,48
18	Dana Otonomi Khusus	5.4.1.2.2.2	0	0	0	0
19	Dana Keterbatasan	5.4.1.2.2.3	124,203,563,500,00	105,499,009,500,00	18,704,488,500,00	117,73
20	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		197,202,619,325,00	1,934,743,305,183,44	15,452,220,000,00	155,94
21	LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.4.1.3				
22	Pendapatan Hidup	5.4.1.3.1	275,520,840,355,11	36,992,009,659,28	28,528,836,139,83	744,81
23	Pendapatan Dana Darurat	5.4.1.3.2	0	0	0	0
24	Jumlah Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah		275,520,840,355,11	36,992,009,659,28	28,528,836,139,83	744,8
25	LAIN - LAIN PENDAPATAN		3,380,523,917,041,16	3,023,322,629,131,71	257,200,887,009,45	111,8
26	BEAN	5.4.2				
27	BERAN OPERASI	5.4.2.1	1,069,351,571,045,74	1,088,294,743,541,05	18,932,702,833,97	98,64
28	Beban Penyebarluasan dan Jasa	5.4.2.2	985,520,699,322,09	906,012,504,717,00	108,75	100,87
29	Beban Biaya	5.4.2.3	0	0	0	0
30	Beban Sudatu	5.4.2.4	320,449,935,418,00	31,680,946,072,81	16,782,350,00	98,75
31	Beban Bantuan Sosial	5.4.2.5	36,999,961,619,20	29,647,304,130,00	12,752,102,00	124,8
32	Beban Penyelenggaran Putung	5.4.2.6	12,871,600,771,79	12,753,129,071,82	904,84	100,72
33	BEAN TRANSFER	5.4.2.7	2,329,189,644,861,01	2,224,394,625,331,71	100,202,000,00	104,45
34	BEAN PENDAPATAN DAN AMORTISASI	5.4.2.8	198,796,662,955,74	120,430,879,659,46	-1,634,145,970,72	98,64
35	Beban Penyebarluasan dan Jasa	5.4.2.9	34,004,692,020,00	33,158,401,322,05	-1,000,000,00	100,96
36	Beban Penyebarluasan dan Jasa	5.4.2.10	87,138,926,741,46	78,731,402,560,63	9,431,281,000,00	111,16
37	Beban Penyebarluasan dan Jasa	5.4.2.11	0	0	0	0
38	Beban Defisit Non Operasional	5.4.2.12	0	0	0	0
39	Beban Pendapatan dan Amortisasi	5.4.2.13	0	0	0	0
40	Beban Penyebarluasan dan Jasa	5.4.2.14	0	0	0	0
41	Beban Pendapatan dan Amortisasi	5.4.2.15	0	0	0	0
42	Beban Pendapatan dan Amortisasi	5.4.2.16	0	0	0	0
43	Beban Pendapatan dan Amortisasi	5.4.2.17	0	0	0	0
44	Beban Pendapatan dan Amortisasi	5.4.2.18	0	0	0	0
45	Beban Pendapatan dan Amortisasi	5.4.2.19	0	0	0	0
46	Beban Pendapatan dan Amortisasi	5.4.2.20	0	0	0	0
47	BEBAN TRANSFER	5.4.2.21	0	0	0	0
48	Beban Bagi Hasil	5.4.2.41	14,593,248,470,00	18,204,379,528,00	-3,611,071,068,00	80,35
49	Jumlah Bagi Hasil	5.4.2.42	14,593,248,470,00	18,204,379,528,00	-3,611,071,068,00	80,35
50	JAHAL BEBAN		2,047,492,233,512,21	2,855,015,873,643,21	29,540,260,454,43	57,4
51	BEAN TRANSFER DARI OPERASI	5.4.3.1	0	0	0	0
52	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	5.4.3.1.1	0	0	0	0
53	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	5.4.3.1.2	0	0	0	0
54	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	5.4.3.1.3	0	0	0	0
55	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	5.4.3.1.4	0	0	0	0
56	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	5.4.3.1.5	0	0	0	0
57	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	5.4.3.1.6	0	0	0	0
58	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	5.4.3.1.7	0	0	0	0
59	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	5.4.3.1.8	0	0	0	0
60	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	5.4.3.1.9	0	0	0	0
61	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	5.4				